

Ringkasan Eksekutif

PROSPEK EKONOMI INDONESIA *Aksi Iklim untuk Pembangunan*

DESEMBER 2023



Ringkasan Eksekutif*

I. Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Terkini

Indonesia telah berhasil mengatasi keterpurukan ekonomi makro dari guncangan global pada waktu-waktu yang berbeda. Pertumbuhan tetap kuat, laju inflasi cenderung menurun dan volatilitas mata uang terkendali. Meskipun demikian, prospek berakhirnya siklus *booming* komoditas dan tingginya suku bunga global dalam jangka panjang membawa tantangan dan dapat membatasi ruang kebijakan makro. Ketika perekonomian bergerak ke masa normal baru ini (*new normal*), reformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja menjadi lebih penting.

Pertumbuhan PDB tetap kuat meskipun perekonomian masih belum pulih sepenuhnya ke tingkat pra-pandemi. Indonesia telah mempertahankan tingkat pertumbuhan di atas 5 persen yoy (*year-on-year*) selama tujuh triwulan berturut-turut, yang sedikit melambat menjadi 4,9 persen pada Tw.3-23 (triwulan ketiga tahun 2023). Sebagian besar aktivitas ini didorong oleh konsumsi swasta yang kuat maupun jasa-jasa terutama di sektor perdagangan grosir dan ritel, transportasi dan pariwisata, serta informasi dan komunikasi. Pada saat yang sama, output masih berada di bawah tingkat pra-pandemi. Perekonomian Indonesia lebih besar saat ini daripada sebelumnya namun masih 6,9 persen lebih kecil dari yang seharusnya dicapai ketika tingkat pemulihan telah cukup kuat untuk mengembalikan perekonomian ke tren pra-pandemi. Hal ini mencerminkan 'sisa-sisa luka' (*scarring effects*) dari pandemi.

Ini selaras dengan tren pasar tenaga kerja yang memperlihatkan pemulihan partisipasi tenaga kerja dan lapangan kerja tetapi kemungkinan penurunan kualitas kerja. Angka partisipasi tenaga kerja meningkat sebesar 0,9 poin persentase (ppt) antara tahun 2022-2023 menjadi 69,8 persen, dengan penambahan tenaga kerja sebanyak 4,6 juta orang yang bekerja sejak tahun 2022. Angka pengangguran terus menurun menjadi 5,3 persen, mendekati level pra-pandemi (5,2 persen pada tahun 2019). Tetapi, prevalensi pekerjaan kelas

menengah mengalami penurunan dari 14 menjadi 9 persen dari total lapangan kerja antara tahun 2019-2022.¹ Antara tahun 2019-2023, jumlah pekerja mandiri maupun pekerja informal dari lapangan kerja yang ada mengalami peningkatan sedangkan jumlah pekerja upahan mengalami penurunan.

Inflasi berhasil dikendalikan setelah terjadi gejolak harga energi pada tahun 2022, meskipun tekanan yang baru mulai muncul dari risiko pasokan pangan dan kembali tingginya harga minyak. Inflasi utama mengalami penurunan selama tujuh bulan berturut-turut menjadi 2,6 persen yoy pada bulan Oktober. Namun, harga beberapa jenis makanan pokok (beras, gula, dan daging ayam) mengalami kenaikan belakangan ini akibat kurangnya pasokan pangan dan pakan ternak. Inflasi harga pangan naik menjadi 5,5 persen pada bulan Oktober, meskipun hasil panen tanaman hortikultura menguntungkan. Kondisi iklim buruk yang berkepanjangan akibat El Nino telah berdampak antara lain terhadap produksi tanaman makanan pokok. Untuk mengendalikan harga pangan domestik dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat miskin, Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa langkah stabilisasi harga dan program-program bantuan pangan.

Tekanan eksternal meningkat akibat kondisi pembiayaan global yang ketat, sehingga memicu arus modal keluar dan tekanan mata uang di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Arus keluar portofolio bersih menjadi lebih cepat pada pertengahan kedua tahun ini, dan mencapai 0,3 persen PDB pada Tw.3-23, sehingga menimbulkan defisit transaksi finansial, yang bertahan sampai tahun kedua berturut-turut. Arus keluar ini hanya sebagian diimbangi dengan penanaman modal asing (PMA) bersih (1,1 persen PDB). Selain itu, ada tekanan tambahan pada transaksi berjalan, yang menimbulkan defisit kecil sebesar 0,01 persen PDB, sebagai imbas dari melandainya surplus perdagangan. Hal ini menandai potensi berakhirnya siklus *booming* komoditas dan

* Terjemahan tidak resmi/tersumpah. Laporan lengkap dalam bahasa Inggris bisa dilihat di www.worldbank.org/iep.

¹ Pekerjaan kelas menengah adalah pekerjaan yang menghasilkan konsumsi rumah tangga bulanan > 3,5 kali melebihi garis kemiskinan (Wihardja dan Cunningham (2021)).

kembalinya Indonesia ke status quo, yang mencatat defisit secara konsisten dari tahun 2012 sampai 2019. Akibatnya, cadangan devisa di Bank Indonesia (BI) menurun, dari puncaknya senilai US\$145 miliar pada bulan Maret 2023 menjadi US\$133 miliar pada bulan Oktober 2023. Meskipun demikian, cadangan devisa masih memadai dan dapat membiayai impor barang dan jasa selama 6 bulan. Rupiah juga tertekan dan terdepresiasi sebesar 8,1 persen terhadap dolar AS sampai bulan Oktober.

Tekanan eksternal mendorong intervensi moneter yang lebih proaktif. Antara bulan Agustus sampai November, pemerintah menggabungkan (1) kebijakan arus modal yang mewajibkan minimal 30 persen devisa hasil ekspor (DHE) komoditas disimpan di bank-bank domestik; (2) kenaikan suku bunga acuan BI7DRR sebesar 25 basis poin; dan (3) menerbitkan instrumen moneter baru dengan denominasi valuta asing. Untuk mengimbangi dampak dari tingginya suku bunga acuan terhadap permintaan domestik, serangkaian kebijakan likuiditas diterapkan: (i) mengurangi giro wajib minimum (*reserve requirement ratio*) bagi bank-bank yang memberikan pinjaman di beberapa sektor tertentu, seperti hilirisasi mineral, pariwisata dan UMKM; (ii) memperpanjang pelonggaran persyaratan prudensial untuk kredit/pembiayaan properti dan kendaraan bermotor (efektif mulai Januari 2024); dan (iii) menurunkan penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) perbankan atas aset berdenominasi rupiah. Dengan terbatasnya *interest-rate passthrough* dalam transmisi kebijakan moneter terkait sektor keuangan yang dangkal, penerapan kebijakan likuiditas BI merupakan instrumen kebijakan yang lebih efektif.

Kebijakan fiskal yang masih dikelola secara berhati-hati melalui akselerasi penerimaan negara dan belanja yang tidak berlebihan. Penerimaan negara mencapai 10,6 persen PDB (Januari sampai Oktober), salah satu yang tertinggi sejak tahun 2015. Hal ini terutama dihasilkan dari PPN, setelah adanya kenaikan tarif 1 poin persen sejak bulan April 2022. Belanja primer tetap ditekan meskipun investasi publik mengalami peningkatan yang signifikan. Total pertumbuhan belanja mengalami penurunan pada bulan Januari hingga Oktober *yoy*, yang menghasilkan rasio belanja-PDB terendah setidaknya dalam satu dekade (10,6 persen PDB). Pembayaran bunga stabil sebesar 1,5 persen PDB, sesuai dengan kenaikan beban pembiayaan. Belanja subsidi mengalami penurunan sejak kenaikan harga BBM bersubsidi dan listrik tahun 2022. Rasio utang publik terus turun dan

bertahan pada 37,7 persen PDB. Mayoritas stok utang merupakan utang domestik (72,1 persen dari total) dan bersifat jangka panjang (87,6 persen). Pada akhir tahun 2023, defisit fiskal diperkirakan akan lebih kecil menjadi 2,1 persen PDB, turun dari 2,4 persen pada tahun 2022.

Indonesia diproyeksi akan mencatat pertumbuhan yang kuat di tahun-tahun mendatang, tetapi risiko penurunan semakin intensif. Perekonomian diproyeksi akan tumbuh rata-rata 4,9 persen per tahun selama 2024-2026, mencerminkan nilai tukar perdagangan yang melemah dan normalisasi tren pertumbuhan ekonomi. Inflasi turun menjadi rata-rata 3,1 persen dan masih akan berada dalam rentang target inflasi BI. Tantangan pada neraca eksternal diperkirakan akan meningkat. Defisit transaksi berjalan secara bertahap akan naik menjadi 1,4 persen PDB pada tahun 2026, karena harga komoditas yang lebih rendah dan pertumbuhan global yang melemah akan menghambat ekspor. Prospek ekonomi menghadapi beberapa risiko penurunan (*downside risks*). Tingginya suku bunga dalam jangka panjang dapat membebani biaya pinjaman dan memperketat akses ke pembiayaan eksternal. Guncangan-guncangan terkait ketidakpastian geopolitik dan perubahan iklim dapat mengganggu rantai pasokan global (*global value chains*) dan nilai tukar perdagangan bisa turun lebih tajam, sehingga mungkin mengurangi penerimaan negara dan memperketat posisi fiskal Indonesia. Di dalam negeri, Pemilu 2024 bisa memperlambat momentum reformasi yang mendukung pertumbuhan.

Dengan fondasi ekonomi makro yang kuat dan berakhirnya siklus pemulihan pasca-COVID, fokus kebijakan akan kembali lagi ke agenda pertumbuhan. Indonesia mempunyai rekam jejak kebijakan yang kredibel dalam menghadapi risiko-risiko penurunan dan menjaga stabilitas ekonomi makro. Defisit fiskal dan defisit transaksi berjalan (*twin deficits*) yang kecil, utang publik yang rendah, cadangan devisa yang memadai, pembiayaan eksternal yang stabil, dan solidnya pertumbuhan ekonomi merupakan penyangga yang kuat bagi perekonomian Indonesia dalam merespons kemungkinan guncangan. Ke depannya, tantangan yang dihadapi adalah untuk memanfaatkan kuatnya fundamental makroekonomi tersebut sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, lebih hijau, dan lebih inklusif. Salah satu pilar inti dari agenda pertumbuhan seperti ini adalah reformasi berbagai permasalahan struktural yang membatasi efisiensi, daya saing dan pertumbuhan produktivitas. Di antara berbagai reformasi tersebut ialah perundang-

undangan yang komprehensif (Omnibus Law): UU Cipta Kerja, Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dan Sektor Keuangan (PPSK). Akan menjadi sangat penting untuk, antara lain, memastikan kelanjutan

dan mempercepat pelaksanaan berbagai reformasi tersebut jika Indonesia ingin mencapai visi menjadi negara berpendapatan tinggi (*high-income country*) pada tahun 2045.

II. Aksi Iklim sebagai Katalisator Pembangunan

Bagian B dari Prospek Ekonomi Indonesia ini membahas bagaimana Indonesia dapat mengatasi perubahan iklim seraya mewujudkan pertumbuhan PDB yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Indonesia telah membuat komitmen penting serta kemajuan dalam mencapai target iklim dan target pembangunannya. Aksi-aksi di sektor hutan dan tata guna lahan (FOLU: penggunaan lahan dan pemanfaatan hutan) telah secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sementara komitmen dan aksi-aksi di sektor energi membantu meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan secara bertahap mengurangi penggunaan batubara. Reformasi fiskal, keuangan, dan sektor-sektor ekonomi lainnya akan melengkapi upaya-upaya tersebut seraya turut mendorong pertumbuhan. Terdapat tanda-tanda pemisahan relatif antara emisi GRK per kapita dan pertumbuhan pendapatan per kapita di Indonesia. Transisi rendah karbon dan tahan iklim Indonesia berpotensi dapat menentukan transformasi ekonomi Indonesia tahap berikutnya.

Pertumbuhan yang kuat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia dalam 20 tahun terakhir bergerak secara paralel dengan peningkatan emisi GRK, sesuai dengan tahap pembangunan Indonesia. Perluasan pembangunan infrastruktur, akses universal terhadap listrik, urbanisasi, dan lapangan kerja non-pertanian telah menyumbang sekitar 5 persen pertumbuhan per tahun secara rata-rata selama periode ini. Angka kemiskinan turun dari 19 persen pada tahun 2000 menjadi 9,5 persen pada tahun 2022. Keuntungan ekonomi juga berarti peningkatan emisi. Emisi Indonesia secara absolut—3,5 persen dari total global—relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara sejawat struktural (*structural peers*)², meskipun emisi per kapita sebanding dengan emisi negara-negara berkembang besar lain dan lebih rendah daripada emisi negara-negara maju.

Sebagian besar emisi GRK Indonesia berasal dari sumber-sumber berbasis lahan, yang diikuti

oleh energi. Penggundulan dan kebakaran hutan menyumbang sekitar 42 persen dari total emisi antara tahun 2000-2020.³ Kegiatan pertanian dan kehutanan seperti pengambilan kayu dan budidaya sawit merupakan penyebab signifikan penggundulan hutan, meskipun aksi-aksi kebijakan telah secara signifikan mengurangi dampaknya dalam beberapa tahun terakhir. Pasokan energi primer (yaitu batubara, minyak, dan gas bumi) merupakan sumber emisi terbesar kedua, yang menyumbang sekitar 39 persen emisi antara tahun 2000-2020. Sekitar 93 persen pasokan energi primer berasal dari bahan bakar fosil, yaitu batubara (43 persen), minyak bumi (31 persen), dan gas bumi (19 persen), dan porsi batubara untuk pembangkit tenaga listrik semakin meningkat selama periode ini.

Selain emisi, Indonesia rentan terhadap guncangan iklim. Antara tahun 1990-2021, Indonesia mengalami lebih dari 300 kali bencana alam—termasuk 200 peristiwa banjir yang berdampak terhadap lebih dari 11 juta penduduk. Bencana alam yang berkaitan dengan iklim mencapai kira-kira 70 persen dari total, dan frekuensinya terus meningkat. Kecenderungan ini diperkirakan akan berlanjut. Naiknya suhu permukaan air laut disebabkan oleh siklon tropis yang semakin parah, sementara curah hujan yang lebih deras akan semakin memperburuk banjir dan tanah longsor. Peristiwa El Niño yang lebih sering berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran, dan pasokan air. Oleh karena itu, langkah-langkah adaptasi yang penting seperti pembentukan dana bersama untuk mengurangi risiko bencana (*disaster risk pooling fund*) diambil sebagai respon.

Indonesia telah membuat komitmen dan kemajuan penting dalam menangani tantangan-tantangan tersebut. Di sektor hutan dan tata guna lahan, penggundulan hutan telah berkurang dari rata-rata 1,08 juta hektar (ha) per tahun antara tahun 2000-2007 menjadi rata-rata 0,11 juta ha per tahun pada tahun 2019-2022, angka terendah sejak tahun 1990.

² Analisis untuk IEP ini menggunakan kelompok standar negara sejawat di mana datanya tersedia: Nigeria, Tiongkok, India, Ukraina, Thailand, Filipina, Meksiko, Republik Arab Mesir, Federasi Rusia dan Brasil. Negara-negara tersebut dipilih berdasarkan kemiripan statistik dalam hal jumlah penduduk, PDB per kapita dan total PDB. Kelompok tambahan negara sejawat aspirasional juga digunakan apabila relevan: Republik Korea, Chile, Polandia dan Republik Ceko. Dalam beberapa hal, negara-negara industri juga digunakan sebagai perbandingan ketika membahas tingkat dan target emisi.

³ Total emisi dari kebakaran hutan, lahan dan gambut antara tahun 2000-20 sebagai bagian dari total emisi (data Kementerian LHK tahun 2021).

Pemerintah Indonesia (Gol) bermaksud melaksanakan FOLU (penggunaan lahan dan pemanfaatan hutan) untuk penyerapan karbon tahun 2030 (yaitu, emisi bersih negatif) berdasarkan Rencana FOLU Net Sink 2030.⁴ Di sektor energi, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meninggalkan penggunaan batubara. Peraturan Presiden No. 112/2022 mencabut batasan harga energi terbarukan dan mengatur harga yang lebih tinggi berdasarkan perbedaan teknologi energi terbarukan, ukuran, dan lokasi. Perpres ini juga menetapkan prinsip-prinsip yang kompetitif untuk pengadaan teknologi energi terbarukan seperti *Solar PV* dan memberikan dukungan fiskal langsung kepada perusahaan listrik negara PLN untuk kapasitas terbarukan yang baru.

Meskipun kebijakan spesifik-sektor untuk mitigasi dibutuhkan, akan sangat efektif jika kebijakan tersebut dilengkapi dengan kebijakan pendukung di bidang fiskal, keuangan, dan perdagangan.

Kerangka fiskal dapat digunakan untuk mengatasi kegagalan pasar dalam kegiatan mitigasi dan adaptasi, meningkatkan pendapatan, dan menyediakan dana penyangga selama pelaksanaan transisi rendah karbon dan tahan iklim. *Sistem keuangan* dapat digunakan untuk meningkatkan dan menyalurkan penghematan (*savings*) untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi, sepanjang hambatan struktural dan paparan terhadap perubahan iklim dan risiko aset terlantar dapat dikurangi. *Kebijakan perdagangan* dapat digunakan untuk memfasilitasi ekspor dan impor hijau, menggerakkan Indonesia menuju teknologi canggih hijau, dan memodifikasi insentif untuk produksi komoditas intensif-karbon.

Kerangka fiskal dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan menekan penggunaan bahan bakar fosil. Insentif untuk penggunaan bahan bakar fosil merupakan sebagian fungsi pajak dan subsidi. Meskipun masih relatif tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara sejawat, dukungan untuk penggunaan bahan bakar fosil sebagai nisbah dari pendapatan pajak di Indonesia telah berkurang, dengan penurunan tajam pada tahun 2015. Ada peluang untuk pengurangan dukungan penggunaan bahan bakar fosil lebih lanjut, yang akan menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan menjadi bantuan sosial masyarakat miskin tepat sasaran dan memperbaiki posisi anggaran belanja. Hal ini terlihat jelas dalam penyesuaian harga bahan bakar minyak tahun 2022. Selain itu, langkah-langkah lebih lanjut mengenai nilai ekonomi karbon yang berpotensi

memanfaatkan skema perdagangan emisi yang baru-baru ini disepakati oleh perusahaan-perusahaan pembangkit tenaga listrik, dapat digunakan untuk mengurangi emisi di sektor-sektor intensif-emisi lain (misalnya, proses industri, pembangkit tenaga listrik lain). Ini juga peluang untuk mendorong konsistensi yang lebih baik pada instrumen-instrumen fiskal dalam rangka memperkuat insentif secara keseluruhan untuk proses dekarbonisasi (dalam beberapa kasus, instrumen-instrumen fiskal di sektor yang sama mempunyai efek penyeimbang).

Sistem keuangan dapat digunakan untuk mengatasi dua tantangan iklim yang saling berkaitan:

- a. **Mengelola risiko-risiko terkait dengan iklim:** Risiko-risiko iklim dapat mengganggu sistem keuangan sehingga mengurangi selera untuk berinvestasi. Di Indonesia, upaya untuk mengatasi tantangan ini mencakup Kebijakan Payung Pembiayaan Berkelanjutan dan peta-peta jalan Otoritas Jasa Keuangan yang berfokus pada taksonomi hijau, keterbukaan informasi keberlanjutan, manajemen risiko iklim, dan instrumen pembiayaan inovatif. Panduan dan uji tekanan (*stress testing*) yang lebih rinci dapat meningkatkan kemampuan sektor keuangan dalam menghadapi risiko-risiko iklim.
- b. **Memobilisasi keuangan untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim:** Pemerintah Indonesia bertekad menghijaukan sistem keuangan melalui regulasi yang mewajibkan praktek berkelanjutan dan mempromosikan instrumen-instrumen seperti obligasi hijau (*green bonds*). Meskipun Indonesia berhasil menghimpun dana sekitar US\$6,4 miliar melalui obligasi hijau dan pinjaman, keterlibatan sektor swasta masih terbatas. Tantangan yang dihadapi mencakup meningkatkan kesadaran pasar, mengurangi biaya penerbitan, dan mengatasi masalah-masalah sisi penawaran seperti kurangnya aset. Sebuah survei oleh Bank Dunia mengungkapkan perlunya standar, transparansi, dan peningkatan kapasitas dalam investasi berkelanjutan, yang menekankan pentingnya definisi yang jelas dan standar pelaporan untuk memastikan kepercayaan investor.

Kebijakan perdagangan dapat digunakan untuk menurunkan biaya aksi iklim. Indonesia menerapkan tarif impor rata-rata yang rendah atas barang dan

⁴Keputusan Menteri No. 168/Menlhk/PKTL/PLA.1/2/2022, Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

teknologi hijau. Akan tetapi, langkah-langkah non-tarif (NTMs) menyebabkan biaya yang signifikan, setara dengan tarif rata-rata 20 persen. Persetujuan impor, kepatuhan pada standar nasional, dan inspeksi pra-pengiriman berdampak terhadap produk-produk yang dibutuhkan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, melampaui dampak yang terlihat di negara-negara sejawat regional. Persyaratan kandungan lokal yang dirancang untuk meningkatkan pengolahan lokal, terutama di sektor energi terbarukan, dapat menghambat adaptasi jangka pendek karena biaya menjadi lebih tinggi dan daya saing menjadi lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Namun, ada peluang untuk mendapatkan manfaat dari transisi rendah-karbon global. Ekspor barang hijau mencapai 3,6 persen dari total ekspor barang pada tahun 2020. Ada potensi peningkatan produk yang lebih ramah lingkungan, manajemen limbah, daur ulang, dan teknologi/produk yang hemat sumber daya. Peningkatan akses ke teknologi hijau melalui perdagangan dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi, dan meningkatkan daya saing di tingkat internasional.

Aksi iklim, seperti yang dianalisis melalui pemodelan ekuilibrium umum yang dapat dihitung (*computable general equilibrium—CGE*), dapat mengurangi emisi GRK dan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Pemodelan yang disajikan dalam IEP ini mengeksplorasi tiga skenario peningkatan ambisi iklim yaitu: skenario pengalihan subsidi listrik dan BBM, skenario Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC: *Nationally Determined Contribution*) dengan kebijakan baru dan pajak karbon, serta skenario NDC+ yang lebih ambisius dengan tarif pajak karbon yang lebih tinggi. Hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa pengurangan emisi akan didorong oleh kombinasi kebijakan sektoral dan fiskal, dengan Skenario 3 (NDC+) yang memproyeksikan 63 persen penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2040 dibandingkan dengan Bisnis seperti Biasa (BAU). Sektor pembangkit memperlihatkan penurunan emisi yang substansial dalam semua skenario, sementara sektor pengolahan dan transportasi juga berkontribusi. Dampak bersih atas PDB jangka panjang bergantung pada bagaimana penerimaan pajak karbon dan pengurangan subsidi dimanfaatkan kembali, dengan hasil-hasil positif yang diproyeksi pada semua skenario, khususnya Skenario 2 (NDC). Akan tetapi, dalam Skenario 3 (NDC+) yang ambisius, pembiayaan eksternal menjadi sangat penting untuk menopang dampak positif setelah tahun 2035. Sektor batubara menghadapi penurunan output yang signifikan, sedangkan sektor-sektor lain

seperti konstruksi, jasa keuangan, perhotelan, dan perdagangan ritel diproyeksi akan berkembang dan dapat menutup kerugian dalam jangka panjang. Analisis pemodelan ini mencakup asumsi-asumsi spesifik dan menegaskan perlunya bersikap hati-hati dalam melakukan interpretasi karena adanya faktor-faktor seperti friksi pasar, asumsi persediaan uang tetap, dan potensi hambatan ekonomi politik terhadap reformasi.

Dengan memanfaatkan kemajuan yang sedang berlangsung, laporan ini menyampaikan pilihan-pilihan untuk memajukan transisi hijau di Indonesia.

Laporan IEP ini berfokus pada ‘penggerak’ (*enabler*) kebijakan fiskal, keuangan, dan perdagangan, yang menurut hasil analisis, memberikan peluang penting untuk mewujudkan sinergi antara aksi iklim dan pertumbuhan. Penggerak kebijakan bertujuan menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan untuk mengalokasikan kembali sumber daya dari sektor-sektor yang bersifat intensif-karbon ke sektor-sektor yang lebih hijau, dan dari bidang-bidang yang berproduktivitas rendah ke bidang-bidang yang berproduktivitas tinggi, seraya juga memobilisasi pembiayaan baru. Patut diperhatikan bahwa daftar pilihan kebijakan ini bersifat sebagian, dan Laporan CCDR Indonesia memberikan pilihan-pilihan tambahan yang meliputi reformasi sektoral serta langkah-langkah adaptasi. Pilihan-pilihan tersebut mencakup:

1. *Mengembangkan peta jalan untuk menyelesaikan reformasi subsidi BBM transportasi.* Kenaikan harga minyak global secara politik mempersulit penghapusan subsidi BBM dalam jangka pendek, tetapi perencanaan reformasi dapat dimulai sekarang untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang lebih baik dalam jangka menengah.
2. *Mengkonversi subsidi harga listrik (PSO PLN) menjadi transfer tunai tepat sasaran.* Ini akan memungkinkan pembebanan tarif yang menutup biaya pembangkit listrik serta menggunakan transfer tunai sebagai kompensasi kenaikan harga bagi masyarakat miskin dan rentan.
3. *Mengembangkan peta jalan terpadu untuk nilai ekonomi karbon.* Mengembangkan peta jalan untuk memperluas nilai ekonomi karbon berdasarkan kajian dampak, biaya, dan kelayakan instrumen-instrumen alternatif di sektor-sektor setelah tahun 2024.
4. *Mengembangkan panduan lebih lanjut mengenai pendekatan manajemen risiko dan persyaratan keterbukaan informasi bagi bank-bank.* Panduan mencakup pengujian tekanan (*stress testing*)

dan metodologi analisis skenario, pendekatan identifikasi dan manajemen risiko, dan prosedur keterbukaan informasi risiko iklim.

5. *Lebih mendorong penggunaan obligasi hijau.* Ini dapat mencakup agregasi dan sekuritisasi sehingga obligasi hijau dapat mencapai ukuran yang diminta oleh investor, melalui penggunaan model dan prosedur kontrak baku; serta mengurangi persyaratan pendaftaran untuk obligasi berlabel hijau.
6. *Mengkaji dan menyederhanakan langkah-langkah non-tarif (NTMs) atas barang-barang hijau.* Beberapa NTMs dapat disederhanakan seperti persetujuan impor dan kepatuhan pada SNI. Beberapa NTMs dapat dipertimbangkan untuk dihapuskan, seperti PSIs dan pembatasan pelabuhan masuk. Seiring waktu, beberapa NTMs

dapat dihapuskan secara bertahap sejalan dengan dikembangkannya sistem *national single window* dan manajemen risiko yang kuat.

7. *Melonggarkan persyaratan kandungan lokal (LCR) sampai permintaan dapat menopang skala ekonomi (economies of scale) lokal.* LCRs yang lebih longgar dapat mendorong pengembangan industri, mengurangi harga bagi para investor energi terbarukan, dan mendorong alih teknologi internasional.

Melalui reformasi-reformasi ini dan reformasi-reformasi lain, Indonesia dapat meningkatkan pendorong dasar produktivitas dan efisiensi sehingga membantu mengurangi biaya jangka pendek penurunan emisi dan adaptasi, serta memperkuat pertumbuhan jangka panjang.

Tabel A.1: Indikator-Indikator Makroekonomi Terpilih

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Aktual				Proyeksi WB			
Pertumbuhan PDB Riil dan Inflasi, persen perubahan year-on-year								
PDB Riil	5,0	-2,1	3,7	5,3	5,0	4,9	4,9	5,0
Indeks Harga Konsumen (IHK) (rata-rata, %)	2,8	2,0	1,6	4,2	3,7	3,2	3,0	3,0
Indeks Harga Konsumen (IHK) (akhir periode, %)	2,6	1,7	1,9	5,5	2,7	3,3	2,8	2,7
Konsumsi Rumah Tangga	5,2	-2,7	2,0	4,9	4,9	4,9	4,8	4,9
Konsumsi Pemerintah	3,3	2,1	4,2	-4,5	5,0	4,3	3,5	3,5
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,5	-5,0	3,8	3,9	4,6	4,5	5,4	5,9
Ekspor	-0,5	-8,4	18,0	16,3	1,2	4,1	3,9	3,5
Impor	-7,1	-17,6	24,9	14,7	-0,3	2,1	3,0	3,5
Neraca Keuangan Publik, Pemerintah Pusat, persen PDB								
Pendapatan	12,4	10,7	11,8	13,5	12,6	12,4	12,6	12,7
di antaranya Pendapatan Pajak	9,8	8,3	9,1	10,4	10,0	10,1	10,3	10,4
Belanja	14,6	16,8	16,4	15,8	14,7	14,6	14,8	15,0
Keseimbangan Primer	-0,5	-4,1	-2,5	-0,4	-0,1	-0,3	-0,3	-0,4
Keseimbangan Fiskal	-2,2	-6,1	-4,6	-2,4	-2,1	-2,3	-2,3	-2,3
Utang Pemerintah Pusat ^(a)	30,2	39,4	40,7	39,5	38,7	38,1	37,8	37,3
Neraca Pembayaran, persen PDB kecuali dinyatakan sebaliknya								
Keseimbangan Transaksi Berjalan	-2,7	-0,4	0,3	1,0	-0,1	-0,7	-1,2	-1,4
Ekspor, Barang dan Jasa	17,9	16,8	20,8	23,9	21,4	20,7	20,5	20,2
Impor, Barang dan Jasa	18,2	15,1	18,3	20,7	19,5	19,1	18,9	18,9
Penanaman Modal Asing Netto	1,8	1,3	1,5	1,1	1,0	1,3	1,5	1,5
Cadangan Devisa Bruto (bulan, impor barang dan jasa)	9,7	7,5	6,4	6,3	6,0	6,1	6,2	6,4
Nilai Tukar Perdagangan (indeks 2018=100)	95,8	97,8	106,4	108,0	101,0	98,3	96,9	95,6
Catatan Memorandum								
PDB Nominal (triliun Rp)	15.833	15.443	16.977	19.588	21.449	22.902	24.531	26.361
PDB per kapita (US\$)	3.877	3.757	3.856	4.021	4.182	4.347	4.521	4.709